

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM SEKTOR PERTANIAN DI SURABAYA MASA WALIKOTA SOEKOTJO TAHUN 1965-1974

SHAFAROTUL FITRIYAH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: shafarotul.fitriyah@gmail.com

Nasution

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kondisi Ekonomi Surabaya pasca Kemerdekaan Indonesia masih dalam keadaan yang belum stabil, hal ini dikarenakan pengeluaran yang cukup tinggi selama perang mempertahankan Kemerdekaan di Surabaya. Kondisi Ekonomi tersebut mengakibatkan pemerintah harus mengubah kebijakan dalam bidang ekonomi dan harus melakukan upaya pembangunan di bidang ekonomi. Walikota Soekotjo sebagai Walikota Surabaya (1965-1974) memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan baru dalam bidang ekonomi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Walikota Soekotjo dilakukan dalam berbagai sektor termasuk pada sektor pertanian yang mengacu pada pembangunan pada tingkat nasional yakni program Bimas dan Inmas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) pelaksanaan program Bimas dan Inmas Lama di Surabaya masa Walikota Soekotjo tahun 1965-1969; (2) pelaksanaan program Bimas dan Inmas Baru di Surabaya masa Walikota Soekotjo tahun 1969-1974. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni Heuristik, Verifikasi/ Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan program Bimas dan Inmas masa Orde lama di Surabaya mengalami beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan Bimas dan Inmas tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bimas dan Inmas maka di tahun 1969 dalam pelaksanaan program pembangunan Repelita I dilaksanakan juga program Bimas dan Inmas baru, dimana pelaksanaan Bimas dan Inmas baru ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pada Bimas dan Inmas Lama dan untuk meningkatkan produksi beras di Surabaya. Pelaksanaan Bimas dan Inmas baru kemudian mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Surabaya termasuk mampu mengatasi permasalahan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan Bimas dan Inmas Lama.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Pertanian, Bimas dan Inmas, Walikota Soekotjo

Abstract

Surabaya Economic Condition post-Independence Indonesia is still in a state that is not stable, this is due to high expenditure during the war to maintain Independence in Surabaya. Economic conditions that cause the government should change the policy in the economic field and should make efforts in the economic development. Mayor Soekotjo as Mayor of Surabaya (1965-1974) has an obligation to make new policies in the economic field that are expected to overcome the economic problems. The economic policy issued by Mayor Soekotjo is done in various sectors including the agriculture sector which refers to development at the national level ie Bimas and Inmas program. The problems studied in this research are: (1) implementation of Bimas and Inmas Lama program in Surabaya during Mayor of Soekotjo 1965-1969; (2) the implementation of Bimas and Inmas Baru program in Surabaya during the Mayor of Soekotjo in 1969-1974. The method used in this research is a historical research method consisting of four stages of Heuristic, Verification / Source Criticism, Interpretation, and Historiography.

The result of the research is that the implementation of Bimas and Inmas program during the old order in Surabaya has several obstacles that make the implementation of Bimas and Inmas can not achieve maximum result. To overcome the obstacles in the implementation of Bimas and Inmas, in 1969 the

implementation of the Repelita I program is also implemented the new Bimas and Inmas program, where the implementation of Bimas and Inmas is aimed to solve the problems in Bimas and Inmas Lama and to increase rice production in Surabaya. Implementation of Bimas and Inmas new then able to give positive impact for society of Surabaya including able to overcome the problems that had happened in the implementation of Bimas and Inmas Lama.

Keywords: Economic Development, Agricultural, Bimas and Inmas, Mayor Soekotjo

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik.¹ Pembangunan dilaksanakan dalam berbagai bidang untuk mencapai suatu taraf yang belum pernah dicapai sebelumnya. Upaya pencapaian taraf tersebut ditujukan untuk mencapai kesejahteraan sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Pembangunan menjadi hal yang biasa dilakukan setiap negara dengan tujuan mencapai taraf yang lebih baik dari sebelumnya. Khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya.²

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memperhatikan adanya peningkatan taraf hidup masyarakatnya yakni dengan melaksanakan program pembangunan dalam berbagai bidang. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat yang memiliki daya, kekuatan atau kemampuan, yang dimaksud adalah dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.³ Oleh karena itu pembangunan juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat bukan hanya bagi pemerintah yang membuat kebijakan dan program pembangunan, jadi pembangunan dalam berbagai bidang juga perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat baik dalam aspek fisik maupun materi.

Pembangunan Indonesia semakin pesat karena adanya program pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya pencapaian stabilitas bangsa dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia pasca peristiwa 1965. Pembangunan dilakukan di bidang politik, sosial dan ekonomi, salah satunya melalui kebijakan dari Presiden Soekarno yakni Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun pada tahun 1961-1969 yang ditetapkan oleh Presiden sejak dikeluarkannya ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pembangunan tersebut berisikan tripola pembangunan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yakni pembangunan rokhania dan jasmania yang sehat dan kuat serta pembangunan tata perekonomian

nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pasang surutnya ekonomi pasar dalam lingkup Internasional.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan ditujukan mengatasi permasalahan inflasi yang sempat terjadi di tahun 1965. Pada masa itu terjadi hiper inflasi yang mencapai lebih dari 500%-650% pada akhir tahun 1965.⁴ Kemudian dilakukan upaya untuk mengatasi hiper inflasi yang terjadi tahun 1965 yakni melalui *Devaluasi* agar mata uang yang beredar kembali stabil masa Orde Lama.

Pembangunan Indonesia menjadi sangat penting karena pada saat itu terjadi masa peralihan pemerintahan yakni peralihan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, peralihan tersebut kemudian memunculkan sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan pemerintahan Orde Baru. Peralihan tersebut juga mengakibatkan adanya peralihan dalam sistem ekonomi Indonesia yakni sistem ekonomi Orde Lama yang bersifat sosialis dibawah kebijakan Presiden Soekarno menjadi sistem ekonomi yang semi kapitalis dalam masa Orde Baru dibawah kebijakan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru menekankan pengawasan secara langsung dari pusat ke berbagai bidang termasuk dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut semakin giat dilakukan untuk mengatasi inflasi yang masih terjadi tahun 1966 yakni dengan laju inflasi 30%-50%.⁵ Selain itu pembangunan juga dilakukan karena adanya berbagai krisis di Indonesia maupun daerah-daerah, khususnya yakni adanya krisis pangan yang sempat terjadi dan mengakibatkan harga beberapa bahan makanan pokok mengalami kenaikan yang tinggi.

Pembangunan masa Orde Baru dilaksanakan melalui program "Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969" yang kemudian tidak bisa terlaksana secara maksimal karena adanya masalah di Indonesia akhir tahun 1965. Selanjutnya ditetapkan suatu program pembangunan yang dimuat dalam ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang tugas pokok kabinet pembangunan yakni tentang garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-1 1969-1974 disingkat Repelita I.⁶ Proses pembangunan dalam program Repelita dilakukan sejak 1

¹ N. H. T. Siahaan. 2004. *Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga., hlm. 19

² *Ibid.*

³ Devi Kristina Anggraini. 2013. *Industri Surabaya Pada Masa Pemerintahan Walikota Soekotjo Tahun 1965-1974*. Jurnal (online). Vol. 3 No. 1. Universitas Airlangga Surabaya., hlm. 62

⁴ Wali Aya Rumbia. 2009. *Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Tingkat Pertumbuhan Ekonomi*.

<http://118.97.35.230/pustaka/download/wali-aya-rumbia/perekonomian%20nasional%20ditinjau%20dari%20tingkat%20pertumbuhan%20ekonomi.pdf>. Diakses padaminggu 22 januari 2017

⁵ *Ibid.*

⁶ C. S. T. Kansil. 1970. *Inti Pengetahuan REPELITA*. Jakarta: Erlangga., hlm. 12

april 1969 dan berakhir tanggal 31 maret 1974, secara keseluruhan Repelita I itu berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai walaupun dalam beberapa hal terdapat gangguan-gangguan.⁷

Repelita I lebih menitikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian guna memenuhi produksi dan konsumsi makanan masyarakat. Fokus sasaran pembangunan pada bidang pertanian tersebut didukung dengan pembangunan (dan rehabilitasi) prasarana-prasarana ekonomi (jalan dan jembatan) dan telekomunikasi beserta pengembangan sektor pendidikan.⁸ Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program Repelita I tersebut. Tujuan Repelita I yang dimaksudkan ialah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.⁹

Presiden Soeharto dalam menerapkan Repelita I juga melibatkan Gubernur serta Kepala Daerah untuk ikut mendukung pembangunan di daerah provinsi yang akan berdampak positif terhadap pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan presiden kepada para Gubernur/Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Repelita tanggal 2 Desember 1968, yakni tentang pemberian penjelasan dan petunjuk umum mengenai perencanaan Pembangunan Lima Tahun dan pelaksanaannya nanti.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional saja namun juga diterapkan di daerah dan provinsi, salah satunya yakni diterapkan di Surabaya sebuah kota besar yang menjadi Ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Surabaya termasuk kota-kota besar di Asia Tenggara, selain menjadi ibu kota Jawa Timur dan pusat-pusat konsentrasi penduduk, kegiatan ekonomi dan komunikasi, kota ini juga adalah kota nomor dua di Indonesia.¹¹

Kotamadya Surabaya melakukan banyak pembangunan masa kepemimpinan Walikota Let. Kol. R. Soekotjo (1965-1974) yakni karena diterapkan berbagai kebijakan dalam membangun kota Surabaya khususnya pada pembangunan ekonomi Surabaya yang masih dalam keadaan tidak stabil pasca terjadinya krisis pangan 1965 dan dampak dari adanya Inflasi di tahun 1966.

Penerapan Repelita I di Surabaya ini diberlakukan dalam berbagai bidang, salah satunya yakni bidang ekonomi yang mencakup tiga jenis pembangunan yakni pembangunan bidang industri, pembangunan bidang perdagangan, dan pembangunan bidang pertanian dan irigasi. Pembangunan ekonomi Surabaya di sektor pertanian dan irigasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat yakni melalui program Bimas dan Inmas. Program tersebut merupakan usaha dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan luas areal panen dan meningkatkan produksi padi. Selain itu pembangunan juga ditujukan untuk mengatasi krisis pangan 1965 dan mencapai swasembada beras yang telah dicita-citakan oleh pemerintah.

Pembangunan ekonomi di sektor pertanian Surabaya masa Walikota Soekotjo menunjukkan bahwa terdapat usaha dari pemerintah untuk tetap mengembangkan sektor pertanian dalam upaya pembangunan ekonomi. Meskipun pembangunan terus dilaksanakan dalam sektor industri maupun perdagangan namun sektor pertanian tetap dijadikan perhatian utama dalam pembangunan ekonomi. Usaha Walikota Soekotjo untuk mengembangkan pembangunan di sektor pertanian Surabaya tersebut memberikan ketertarikan terhadap penulis tentang bagaimana proses penerapan program pembangunan pada sektor pertanian di Surabaya. Penulis akan menyajikan hal tersebut melalui sebuah karya tulis yang berjudul "*Pembangunan Ekonomi dalam Sektor Pertanian di Surabaya Masa Walikota Soekotjo Tahun 1965-1974.*"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yakni Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Tahap yang pertama yakni Heuristik dimana pada tahap ini dilakukan dengan pencarian sumber primer dan sumber sekunder tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Sektor Pertanian Kota Surabaya Masa Walikota Soekotjo Tahun 1965-1974.

Sumber primer diperoleh penulis saat melakukan pencarian sumber di Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur, dari pencarian tersebut diperoleh sumber primer berupa *Lampiran Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 1 April 1969- 31 Desember 1975*. Pencarian sumber juga dilakukan di Badan Arsip Kota Surabaya yang diperoleh sumber primer berupa arsip dari Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya 24 Maret 1973 yang berisi tentang *Laporan Mingguan Harga Bahan Makanan Pokok dan Situasi Pupuk Untuk Bimas/Inmas*. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 26 Maret 1973 yang berisi tentang *Penyetoran Padi/gabah Peserta Bimas*. Surat dari Kantor Wilayah Surabaya Utara tanggal 10 April 1973 No. 2211/5/WU-73 tentang *Pemberantasan Hama Ulat Tentara*.

Sumber-sumber selanjutnya diperoleh dari Badan Statistik Kota Surabaya, Badan Statistik Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung yang diperoleh majalah Liberty dan Sketmasa, Kampus STIKOSA AWS Surabaya yang diperoleh koran Surabaya Post tahun 1965-1969, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Universitas Airlangga dan Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Proses pencarian sumber tidak hanya dilakukan di perpustakaan dan badan arsip saja tetapi juga dilakukan melalui media internet, dalam pencarian tersebut diperoleh sumber berupa dokumen dan jurnal yakni dokumen yang berjudul *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1975/1976 Republik Indonesia*, beberapa jurnal online dan artikel.

⁷ Marwati Djonoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka., hlm. 579

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

⁹ *Ibid.*, hlm. 578

¹⁰ C. S. T. Kansil. *op cit.*, hlm. 29

¹¹ Howard Dick, dkk. 1997. *Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 457

Tahapan kedua dalam penelitian ini yakni Verifikasi atau kritik sumber, dimana kritik ini dibagi menjadi dua yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern yakni untuk mengkritik isi dari sumber yang telah ditemukan, koran, arsip dan buku-buku yang telah ditemukan kemudian diteliti isinya dan dikritik sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni sumber yang mengkaji tentang Walikota Soekotjo, ekonomi Surabaya dan lainnya yang berpengaruh terhadap penelitian ini serta mendukung penelitian ini maka akan digunakan dan diproses lagi pada tahapan selanjutnya.

Tahap ketiga yakni Interpretasi yang merupakan proses penafsiran sumber yang telah dikritik atau diverifikasi. Pada tahapan ini peneliti mencari hubungan antara sumber satu dengan sumber yang lain yang kemudian ditafsirkan hingga membentuk sebuah fakta sejarah yakni peneliti mencoba mencari hubungan tentang kondisi pertanian di Surabaya tahun 1965-1974 dengan adanya penerapan kebijakan Walikota Soekotjo dalam pembangunan ekonomi di sektor pertanian Surabaya, karena pada tahun 1965-1974 Walikota Soekotjo menerapkan kebijakan pembangunan bidang ekonomi di Surabaya jadi implementasi pembangunan tersebut dapat dilihat dari kondisi pertanian Surabaya tahun 1965-1974 yang merupakan hasil dari pembangunan ekonomi di sektor pertanian masa Walikota Soekotjo.

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah Historiografi, dimana fakta sejarah yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan secara diakronis dan membentuk sebuah laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian sejarah ini tentang Pembangunan Ekonomi dalam Sektor Pertanian di Surabaya Masa Walikota Soekotjo tahun 1965-1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimas Dan Inmas Masa Orde Lama Di Surabaya Masa Walikota Soekotjo Tahun 1965-1969

a) Kondisi Umum Kota Surabaya tahun 1965-1974

Surabaya secara geografis terletak di pantai utara Jawa dengan batas daerah administratif sebelah utara yakni Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah timur Selat Madura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sedangkan secara astronomis Surabaya terletak di Garis Bujur Timur 112°. 30'-113°-0' dan Garis Lintang Selatan 7°.0'-7°.30'.¹² Berdasarkan Topografi Surabaya adalah sebuah dataran rendah yang luas wilayahnya 80,72% atau sekitar 25.919,24 hektar dengan ketinggian -0,5-5m atau 3-8m, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang

terletak di wilayah Surabaya Barat dengan luas 12,77% dan di Surabaya Selatan dengan luas 6,52%.¹³

Kota Surabaya terus berkembang dan menjadi sebuah Kota besar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kota-kota lain di sekitarnya. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 Kota Surabaya disebut dengan Kota Besar yang disingkat KBS (Kota Besar Surabaya) dan ditetapkan adanya pembagian kekuasaan antara Walikota dengan Kepala Daerah di Surabaya, pada masa itu pemerintahan Kota Surabaya dipegang oleh Walikota Soepardi sedangkan jabatan Kepala Daerah dipegang oleh Satrio Sastrodirjo.¹⁴ Kemudian ditetapkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 yang menyatakan bahwa sebutan KBS diubah menjadi Kotapraja Surabaya yang disingkat dengan KPS (Kotapraja Surabaya).¹⁵ Dimana wilayah Kotapraja Surabaya ini mendapat tambahan pemekaran lima kecamatan baru dari semula wilayah kabupaten Surabaya yakni kecamatan Tandes, Sukolilo, Rungkut, Wonocolo, dan Karangpilang.¹⁶

Perubahan penyebutan Kota Besar Surabaya menjadi Kota Praja Surabaya tersebut juga dipengaruhi adanya Dekrit Presiden yang berlanjut dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres) No. 16 tahun 1959 tentang kepemimpinan dibidang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Otonom.¹⁷ Dalam Penetapan Presiden tersebut dijelaskan bahwa jabatan Walikota dan Kepala Daerah berada pada satu jabatan, artinya bahwa tidak boleh ada lagi pemisahan antara jabatan Walikota dan Kepala Daerah.¹⁸

Kemudian sebutan Kotapraja Surabaya berubah lagi menjadi Kotamadya Surabaya akibat adanya perluasan wilayah Kota Surabaya dengan usulan penambahan beberapa kecamatan baru dari Kabupaten Sidoarjo yakni Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Taman (sebagian), dengan penambahan luas wilayah tersebut maka istilah *kaonderan* untuk penyebutan daerah yang berada di luar Surabaya itu berubah menjadi kecamatan dan istilah Kotapraja Surabaya diubah menjadi Kotamadya Surabaya, selanjutnya tahun 1968 dengan dikeluarkannya SK No. 677/K tanggal 9 Oktober 1968 oleh Walikota Soekotjo yang berisi tentang pembagian Kotamadya Surabaya menjadi 16 kecamatan dan 38 lingkungan.¹⁹

Surabaya merupakan sebuah kota yang padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan Kota

¹² Lampiran Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 1 April 1969-31 Desember 1975 pada Buku II Bab Pembantu Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Timur., hlm. 849

¹³ Denik Nur Cahyanti. 2014. *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 1950-1966*. Jurnal (online). Vol. 2 No. 3, Oktober 2014. Universitas Negeri Surabaya., hlm. 148

¹⁴ Yousri Nur Raja Agam. 2013. *Riwayat Surabaya Rek*. Surabaya: Cahaya Aura Kasih., hlm. 244

¹⁵ Rifqi. 2015. *Menegenal Lebih Dekat Saksi Sejarah Kota Surabaya*. Rifqimediaagency.blogspot.co.id. Diakses pada minggu 05 february 2017

¹⁶ *City Story: Surabaya*. 20 November 2014. www.propertyandthecity.com. Diakses pada Senin 03 April 2017

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yousri Nur Raja Agam. *op cit.*, hlm. 246

Surabaya yang semakin meningkat dalam berbagai bidang khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Berikut adalah rincian jumlah pertumbuhan penduduk di Surabaya tahun 1920-1988:

Tabel 1.1: Pertumbuhan Penduduk Surabaya 1920-1988

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1920	97.017	100.766	197.783
2	1930	176.444	165.995	342.439
3	1940	197.999	198.730	396.729
4	1950	303.558	361.340	714.898
5	1960	655.650	663.280	1.318.930
6	1971	744.828	752.832	1.497.660
7	1980	916.354	959.788	1.876.132
8	1988	1.077.129	1.093.312	2.179.441

Sumber: Diolah dari Aminuddin Kasdi, dkk. 2008. *Surabaya dan Jejak Kepahlawanannya*. Surabaya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya., hlm. 23

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Surabaya hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan jumlah penduduk 2.179.441 jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebut membuat Kota Surabaya harus dapat berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Surabaya, hal ini juga menjadi salah satu faktor bagi pembangunan Kota Surabaya. Oleh karena itu pembangunan direncanakan oleh Pemerintah Surabaya untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang menjadi daya tarik utama bagi para imigran yang datang ke Surabaya.

Pembangunan ekonomi di Surabaya diupayakan oleh pemerintah Kota Surabaya juga dikarenakan di tahun tersebut harga bahan makanan di Surabaya yang masih naik turun dan cenderung belum bisa stabil. Harga beberapa bahan makanan pokok yang ada di Surabaya tahun 1965, 1966, dan 1967 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2: Harga Rata-Rata Bahan Makanan dan Beras dalam Pasar di Surabaya

No	Nama Barang	Satuan	Daftar Harga (dalam RP)		
			1965	1966*	1967
1	Beras Tuton	1 kg	230,-	8.000	14,-
2	Gula Pasir	1 kg	500,-	7.500	20,-
3	Gula kelapa	1 kg	170,-	5.750	10,50
4	Garam	1 kg	30,-	1.000	3,-
5	Minyak Kelapa	600 cc	500,-	6.500	18,50
6	Minyak Tanah	600 cc	30,-	1.000	1,50
7	Teri Asin	1 kg	900,-	14.000	30,-
8	Ikan Asin	1 kg	750,-	18.000	30,-
9	Singkong	1 kg	25,-	4.000	2,-
10	Kacang Ose Merah	1 kg	300,-	5.000	8,-

Sumber: *Laporan Seksi Statistik Kotapraja Surabaya & Bagian Perekonomian Kotamadya Surabaya*. Dalam Skripsi Rina Krisnawati. 2010. *Lotere Totalisator Di Surabaya tahun 1968-1969*. Suarabaya: Universitas Airlangga Surabaya. Hal: 21

* = Uang Lama

** = Uang Baru

Kenaikan harga bahan makanan pokok tahun 1966 yang dapat diketahui dari tabel diatas diakibatkan adanya inflasi yang menyebabkan menurunnya kegiatan produksi pada suatu sektor baik pertanian maupun industri, hal inilah yang mengakibatkan adanya kelangkaan bahan makanan pokok tersebut²⁰. Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa harga bahan makanan pokok tahun 1966 lebih tinggi dibandingkan dengan harga makanan pokok tahun 1965 dan 1967. Tahun 1967 harga bahan makanan pokok kembali turun hal ini dikarenakan adanya upaya penanganan inflasi yang membuat kelangkaan bahan makanan dan membuat harga bahan makanan tersebut sangat tinggi, upaya dalam mengatasi inflasi tersebut kemudian memberikan dampak yang sangat positif bagi peredaran bahan makanan pokok di Surabaya dan harganya yang kembali normal. Meskipun demikian pembangunan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai

²⁰ Rina Krisnawati. 2010. *Lotere Totalisator Di Surabaya tahun 1968-1969*. Suarabaya: Universitas Airlangga Surabaya., hlm. 20

realisasi kebijakan Walikota Surabaya dan kebijakan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat.

b) Kepemimpinan Walikota Soekotjo di Surabaya

Pasca peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 dan berakhirnya Orde Lama maka masa kepemimpinan Walikota Murachman di Surabaya juga berakhir karena dianggap didukung oleh pihak PKI dan untuk menggantikan kepemimpinan Murachman maka pemerintah pusat menunjuk R. Soekotjo yang mempunyai latar belakang militer untuk menjadi walikota Surabaya selanjutnya. Walikota Let. Kol. R. Soekotjo menjabat sebagai walikota Surabaya selama dua periode yakni periode pertama pada tahun 1965-1969 dan periode yang ke-2 pada tahun 1969-1975.

R. Soekotjo lahir di Kalangbret, Tulungagung 13 oktober 1921, Soekotjo memiliki karir kemiliteran yang sangat baik, beliau mendapat berbagai gelar dalam dunia militer diantaranya yakni Tanda Jasa Gerilya Kartika, Sewindu Kesetiaan 24 Tahun, Perang Kemerdekaan I dan II, Madiun Affair, APRA Affair Sulawesi Selatan, Gom Jabar, Sapta Marga, Garuda III, Penegak²¹. Dengan berbagai gelar tersebut maka R. Soekotjo memiliki nilai lebih untuk menjadi kandidat tunggal Walikotamadya Surabaya menggantikan Moerachman.

Alasan-alasan lain dipilihnya Soekotjo sebagai kandidat tunggal walikota Surabaya selain prestasi Soekotjo dalam bidang militer yakni karena kepeloporan Soekotjo dalam penumpasan Gestapu/PKI yang kemudian menjadi itikaf baik terhadap pembinaan Orde baru di daerah Kotamadya Surabaya, alasan selanjutnya yakni karena Soekotjo telah bersedia untuk turun kebawah untuk menyaksikan keadaan sebenarnya daerah-daerah dan kecamatan di seluruh Surabaya.²² Kolonek R. Soekotjo pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 1965 dilantik sebagai Walikotamadya Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur, pelantikan dilakukan pada Sidang Paripurna DPRDGR Kotamadya Surabaya yang bertempat di Balai Pemuda Surabaya.²³

Sebagai Walikota Surabaya R. Soekotjo menaruh perhatian khusus terhadap para pegawai yang berada dibawahnya, Walikota Soekotjo mengingatkan untuk terus mawas diri, dalam hal ini maksudnya yakni setiap jumlah uang Kotamadya Surabaya yang telah digunakan oleh para pegawai dan juga oleh beliau sendiri harus untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya agar tidak ada tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.²⁴ Kewaspadaan Walikota Soekotjo ini merupakan cerminan dari kebijaksanaan seorang pemimpin, beliau tidak hanya mengingatkan kepada para pegawai tetapi juga mewaspadaikan diri sendiri agar tetap menggunakan uang dan segala fasilitas Surabaya untuk kesejahteraan masyarakat

Surabaya, tujuan utama dari semua kewaspadaan tersebut adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kekhawatiran dalam masyarakat Surabaya terhadap kepemimpinan pemerintahnya.

Selama menjabat sebagai walikota Surabaya Soekotjo melakukan pembangunan dalam berbagai bidang di Surabaya salah satunya yakni dalam bidang ekonomi. Awal menjabat beliau sudah gencar melakukan perbaikan dalam ekonomi Surabaya yang saat itu sedang melemah karena adanya inflasi. Inflasi yang terjadi di Surabaya menyebabkan kemacetan pada produktifitas industri dan juga berdampak pada kelangkaan barang.²⁵ Oleh karena itu Walikota Soekotjo mengupayakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut.

c) Pelaksanaan Bimas dan Inmas Masa Orde Lama di Surabaya Masa Walikota Soekotjo Tahun 1965-1969

Surabaya mengalami masa pembangunan yang intensif masa kepemimpinan Walikota Soekotjo pada periode pertama yakni tahun 1965-1969. Sasaran dari program pembangunan tersebut yakni di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi pembangunan difokuskan pada sektor pertanian, industri dan perdagangan. Dimana dalam sektor pertanian ini pembangunan masih diupayakan melalui berbagai hal, karena sektor pembangunan merupakan sektor penghasil sandang pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pembangunan ekonomi Kota Surabaya juga difokuskan pada pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi pada sektor pertanian dan mengatasi permasalahan sandang dan pangan. Sasaran program pembangunan dalam sektor pertanian ini adalah para petani pedesaan di Surabaya karena mereka masih cenderung menggunakan alat-alat tradisional seadanya dan masih bersifat subsisten. Para petani pedesaan masih hidup dalam keadaan yang serba berkesukupan dan belum mempunyai inisiatif untuk mengembangkan produksi pertanian mereka ke pasaran.

Sifat tradisional pada petani pedesaan di Surabaya juga terlihat pada berbagai tradisi yang masih dilakukan oleh petani tersebut. Salah satu tradisi yakni tradisi sedekah hasil bumi yang masih dijalankan di Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes Surabaya.²⁶ Selanjutnya disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi sedekah bumi tersebut yakni sebagai wujud rasa syukur atas panen padi yang diperoleh oleh para petani dan wujud pelestarian budaya nenek moyang.²⁷ Pelaksanaan tradisi tersebut juga dapat dilihat sebagai ciri khas dari petani pedesaan yang masih tradisional di Surabaya.

²¹ Agus Wahyudi. 2006. *Sketsa Tokoh Surabaya*. Surabaya: Selasar., hlm. 276

²² Surabaya Post, Senin 2 Oktober 1967 Tahun Ke- XIV No. 502. *Pengertian Masyarakat Tertumpah Kepada Walikota Kol. R. Soekotjo.*, hlm. 2

²³ Surabaya Post, Sabtu 7 Oktober 1967 Tahun Ke- XIV No. 507. *Kolonek R. Soekotjo Dilantik Sebagai Walikota Surabaya.*, hlm. 2

²⁴ Surabaya Post, Jum'at 12 Januari 1968 Tahun ke- XIV No. 574. *Walikota Kolonel Soekotjo : Semua Fihak Agar Mawas Diri Apakah Tidak Korupsi & Tjuman Ngompol.*, hlm. 3

²⁵ Rina Krisnawati. *op cit.*, hlm. 20

²⁶ Alfin Syah K. Putri. 2003. *Tradisi Sedekah Bumi (Kajian Tentang Keberadaan Tradisi Sedekah Bumi di Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya)*. Abstrak Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

²⁷ *Ibid.*

Pelaksanaan berbagai tradisi tersebut bukanlah suatu hal yang negatif dan merugikan bagi para petani pedesaan, namun sikap para petani yang masih tradisional dan subsisten yang dikhawatirkan akan menghambat perkembangan produktivitas para petani pedesaan. Hal ini dikarenakan para petani sudah terlanjur terbiasa dengan sistem pertanian tradisional yang masih subsisten oleh karena itu dibutuhkan pemikiran yang lebih rasional dalam diri para petani. Hal tersebut ditujukan agar para petani mampu lebih berfikir realistis, yang dimaksudkan yakni agar petani mampu mempertimbangkan untung dan rugi dalam proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian para petani akan mampu membaca peluang dalam memasarkan hasil pertaniannya, sehingga para petani tersebut berinisiatif untuk lebih mengembangkan produksi pertaniannya. Hal ini yang membuat pemerintah harus ikut campur dalam membangun sistem pertanian pada para petani pedesaan di Surabaya. Tindakan yang diambil pemerintah Surabaya yakni dengan melaksanakan program pembangunan dalam sektor pertanian di Surabaya.

Diketahui bahwa pembangunan pertanian ini sebagian besar dilaksanakan di wilayah Surabaya Selatan yang merupakan daerah pedalaman penghasil pertanian dan perkebunan.²⁸ Wilayah Surabaya lainnya yang merupakan daerah sasaran pembangunan pertanian yakni Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Gubeng.²⁹

Walikota Soekotjo selanjutnya mengupayakan pembangunan di bidang pertanian yang mengacu pada program pembangunan di lingkup nasional yaitu program Bimas dan Inmas yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno tahun 1965 dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan krisis pangan khususnya beras. Selain itu sejak pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memfokuskan pembangunan dibidang pertanian dengan tujuan untuk mencapai swasembada beras.

Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis dan mencapai swasembada beras tersebut yakni dengan mengeluarkan rencana-rencana pembangunan di bidang pertanian yang dimulai dari rencana kemakmuran Kasimo³⁰ tahun 1952-1956, kemudian dilanjutkan dengan program Padi Sentra³¹ 1959-1962, kemudian program Demas (Demonstrasi Massal)³² tahun 1963-1964, dan akhirnya sampai pada penerapan program Bimas

(Bimbingan Massal) yang dilaksanakan sejak tahun 1964, kemudian dilanjutkan pada penerapan program Inmas yang dilaksanakan sejak tahun 1969.³³

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bimas maka pada pertengahan tahun 1966 pemerintah membentuk Kolognas (Komando Logistik Nasional) yang diberi tugas untuk menangani masalah logistik penyebaran barang-barang kebutuhan pokok serta menyalurkan dana kepada peserta Bimas melalui aparat pemerintah yang ditunjuk yaitu Gubernur dan Bupati.³⁴ Dengan demikian maka program Bimas dan Inmas mulai dilaksanakan di Jawa Timur dan daerah-daerah didalamnya termasuk di Kota Surabaya.

Program Bimas dan Inmas dijalankan melalui kegiatan penyuluhan kepada para petani, meskipun dalam perkembangannya penyuluhan tidak lagi diminati oleh para petani Bimas. Menurut Mubyarto (1984:41) dalam Skripsi Li Rubi Kandar (2014:37), menjelaskan bahwa Sistem penyuluhan Bimas dilakukan dengan usaha dorongan yang persuasif melalui contoh-contoh yang dapat ditiru, penyuluhan tersebut dilakukan di kebun-kebun percobaan, demonstrasi plot, dan di sawah-sawah milik para petani.³⁵ Selain itu juga diberikan bantuan berupa pupuk dan peralatan pertanian pada para petani Bimas. Kemudian program Inmas diberikan kepada para petani sebagai penyaluran dana bantuan Bimas melalui kredit yang nantinya akan dikembalikan jika produksi padi telah berhasil dijual oleh para petani.

Program Bimas yang dilaksanakan di daerah-daerah Jawa Timur termasuk Surabaya telah mampu menghasilkan produksi beras (padi) yang cukup baik yakni naik dari 4 menjadi 8 ton, hal ini dianggap sudah merupakan sebuah pencapaian yang baik namun penguasaan produksi hanya sekitar 10%.³⁶ Dalam penerapan Bimas tersebut terlihat bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan di Jawa Timur sudah dinilai cukup berhasil meskipun presentase kesuksesannya hanya sekitar 10%, karena hal tersebut sudah merupakan upaya untuk mengatasi krisis pangan tahun 1965.

Berdasarkan laporan Departemen Pertanian yang menyatakan bahwa produksi beras tahun 1967 mengalami peningkatan yakni 2,2% dari jumlah produksi di tahun 1966, dimana tahun 1967 jumlah produksi beras mencapai 80,7% yakni sekitar 17.930.000 ton, tetapi peningkatan tersebut masih dibawah target.³⁷ Peningkatan produksi beras yang terjadi sebagian besar dikarenakan penerapan

²⁸ Handinoto dan Samuel Hartono. 2007. *Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City)*. Jurnal (online). Dimensi Teknit Arsitektur Vol. 35 No. 1. Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya., hlm. 88

²⁹ Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. 26 Maret 1973. *Penyetoran Padi/gabaha Peserta Bimas*. Arsip Kota Surabaya.

³⁰ Program ini disusun oleh Menti Urusan Bahan Makanan I. J. Kasimo, program ini berupa rencana produksi tiga tahunan yang ditujukan untuk usaha swasembada pangan dan meningkatkan produksi bahan pangan. Estiningtyas. *Kondisi Perekonomian Indonesia di sektor Pertanian*. wordpress.com. diakses pada Sabtu 15 April 2017

³¹ Program padi Sentra yakni sebuah program intensifikasi yang dipusatkan pada sentra-sentra produksi padi melalui pemberian kredit natura dan modal kerja kepada para petani. Baca: *Pertanian, Pengairan, dan Kehutanan*. Bappenas.go.id. diakses pada Sabtu 15 April 2017., hlm. 5

³² Demonstrasi massal (Demas) yakni usaha intensifikasi seluas 10.200 ha yang dilaksanakan di 15 provinsi sentra produksi dengan pencapaian hasil yang cukup baik. Baca: *Pertanian, Pengairan, dan Kehutanan*. *Ibid*.

³³ Sjojfan Asnawi. *Irigasi*. Prisma II, 1998., hlm. 5

³⁴ R. Z. Leirissa, dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., hlm. 101

³⁵ Li Rubi Kandar. 2014. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunung Kidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974)*. Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta., hlm. 37

³⁶ Surabaya Post, Selasa 3 Mei 1966 Tahun Ke- XIV No. 93. *Bimas Hasilkan Baik Sekali Tapi Penguasaan Produksi Beras Oleh Pemerintah Hanya Sukses 10 Persen.*, hlm. 2

³⁷ Surabaya Post, Djum'at 19 Djanuari 1968 Tahun Ke- XIV No. 583. *Laporan Tahunan Dep. Pertanian: Produksi Beras 1967 Meningkatkan 2,2% Tetapi Dibawah Target.*, hlm. 2

kebijakan Bimas dan Inmas yang mengusahakan kenaikan produksi pangan agar mampu mengatasi krisis pangan yang terjadi sebelum penerapan Bimas dan Inmas. Kenaikan produksi beras selama penerapan program Bimas dan Inmas 1967 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat produksi beras dalam pelaksanaan Bimas 1965 yakni mengalami penurunan 5% dan bila dibandingkan tahun 1966 menurun 4%.³⁸ Meskipun dalam penerapannya sempat terjadi kendala, namun penerapan program Bimas dan Inmas memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pangan terutama beras.

d) Permasalahan dalam pelaksanaan Bimas dan Inmas

Penerapan program Bimas dan Inmas masa Orde Lama belum bisa terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan terdapat berbagai hambatan dalam proses pelaksanaannya diantaranya yakni:

1. Harga Pupuk

Dalam laporan para Bupati di Jawa Timur dijelaskan bahwa hambatan bagi peningkatan produksi pangan dalam penerapan Bimas adalah harga pupuk di pasaran yang lebih rendah dari harga pupuk petani (perusahaan) jadi harga yang ditawarkan untuk para petani Bimas lebih tinggi dibandingkan harga pupuk di pasaran, hal ini dikarenakan terlambatnya dropping keuangan yang realisasinya baru diterima oleh para petani setelah tanaman keluar atau setelah musim tanam padi.³⁹ Berdasarkan laporan mingguan harga makanan pokok dan pupuk dalam situasi Bimas/Inmas tahun 1973 maka dapat diketahui bahwa harga pupuk urea yakni Rp. 26,60.⁴⁰ Dengan adanya hambatan harga pupuk tersebut membuat sebagian petani tidak mampu menjangkau harga pupuk dan tidak bisa menggunakan pupuk bagi bibit padi yang ditanam, secara otomatis hal ini mengakibatkan menurunnya produksi padi bagi para petani Bimas.

2. Penyaluran Dana Bantuan Kredit

Hambatan dalam proses penyaluran kredit bagi petani Bimas mengalami kendala dikarenakan tidak lancarnya penyaluran sarana produksi,⁴¹ Hal ini menyebabkan proses produksi menjadi terganggu dan hasil produksi tidak bisa sesuai dengan hasil yang telah ditargetkan. Dengan demikian maka pengembalian dana kredit menjadi terlambat karena hasil produksi tidak bisa dijual secara maksimal karena tidak lancarnya proses produksi. Selain itu hambatan dalam hal kredit juga terjadi karena pihak petugas yang kurang aktif dalam penarikan dana pengembalian kredit, hal ini dikarenakan pengambilan kredit dilaksanakan secara berkelompok sehingga tidak ada rasa tanggung jawab secara pribadi pada para petani.⁴²

Adanya keterlambatan pengembalian dana bantuan kredit tersebut maka dalam penerapan Bimas dan Inmas yang baru selanjutnya pengembalian dana diambil dari sebagian hasil produksi pertanian para petani Bimas. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan baik dari petugas dana bantuan kredit maupun dari para petani Bimas. Pengembalian dana bantuan kredit berupa sebagian hasil produksi pertanian ditentukan seperenam dari hasil panen para petani Bimas, hal ini didasarkan pada Inpres No. 31 tanggal 17 Oktober 1968.⁴³ Oleh karena itu dengan luas areal Bimas Kotamadya Surabaya 3.300 ha maka para petani Bimas/ Kredit Bimas menyetorkan gabah kualitas kering giling sebanyak 500 kg setiap hektarnya, gabah tersebut disetorkan ke gudang BUUD setempat.⁴⁴

3. Petani Subsisten

Pelaksanaan Bimas dan Inmas juga mengalami hambatan akibat kurangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap penerapan program tersebut karena para petani pedesaan yang masih subsisten dianggap kurang tanggap dalam merespon kebijakan Bimas dan Inmas.⁴⁵ Kondisi para petani pedesaan yang sudah terbiasa dengan ekonomi subsisten membuat para petani tidak bisa dengan mudah beradaptasi dengan penerapan Bimas dan Inmas yang dianggap sebagai program pembangunan pertanian yang lebih modern. Para petani pedesaan sudah merasa cukup dengan hasil produksi yang diperoleh, dengan demikian para petani tersebut tidak mempunyai keinginan untuk lebih mengembangkan pertaniannya melalui program Bimas dan Inmas.

4. Aksi Sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI)

Selain hambatan-hambatan internal tersebut terdapat juga hambatan eksternal yang terjadi. Hambatan tersebut yakni datang dari kondisi Indonesia yang sedang mengalami disintegrasi dalam dunia politik. Situasi tersebut memunculkan Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang dianggap memicu disintegrasi tersebut. Partai Komunis Indonesia dalam pergerakannya melakukan afiliasi terhadap berbagai aspek masyarakat termasuk terhadap para petani Indonesia. Afiliasi tersebut kemudian memunculkan sebuah organisasi milik para petani yang diberi nama Barisan Tani Indonesia (BTI).

Barisan Tani Indonesia melakukan aksi-aksi sepihak dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi sektor pertanian. Pada awalnya para petani yang pengikut BTI diperkenalkan secara langsung tentang UUPBH dan UUPA yang diorganisasikan dengan tema-tema perjuangan masyarakat desa, yakni seperti "*tanah untuk petani yang betul-betul menggarap tanah*".⁴⁶ Selanjutnya di tahun 1964 terjadi aksi dari BTI di Kecamatan Tandes Surabaya yakni BTI berusaha menekan panitia *Landreform* agar segera mendistribusikan tanah lebih bagi para petani

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Surabaya Post, Rabu 6 Maret 1968 Tahun Ke- XIV No. 622. *Bimas Terhambat Oleh Ketidaksamanya Harga Pupuk Pasar Dan Petani.*, hlm. 2

⁴⁰ Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya. 24 Maret 1973. Laporan Mingguan Harga Bahan Makanan Pokok dan Situasi Pupuk Untuk Bimas/Inmas. Badan Arsip Kota Surabaya

⁴¹ <http://repository.ipb.ac.id>.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. 26 Maret 1973. *Penyetoran Padi/gabah Peserta Bimas.* Badan Arsip Kota Surabaya

⁴⁵ Hikmah Rafika Mufti. 2009. *Kebijakan Pangan Pemerintah Orde baru dan Nasib kaum Petani Produsen Beras 1969-1988.* Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta., hlm. 3

⁴⁶ Aminuddin Kasdi. 2016. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965.* Surabaya: Unesa University Press., hlm. 146

penggarap (petani kecil/buruh tani).⁴⁷ Aksi selanjutnya juga terjadi di wilayah Kampung Patemon yakni aksi penyerobotan tanah milik petani kaya, aksi-aksi BTI tersebut juga merugikan para pemilik tanah karena BTI sering melakukan pemaksaan kepada pemilik tanah untuk mengesahkan tanah miliknya untuk dihibahkan.⁴⁸

Aksi-aksi dari BTI terhadap penyerobotan tanah tersebut tidak mengalami kendala karena pada pelaksanaannya BTI sering menuntut agar Walikota Murachman⁴⁹ segera mendukung dan mengabdikan tuntutan BTI di Surabaya. Aksi BTI tersebut pada dasarnya menekankan pada perlawanan konsep *patron-klien* yang masih memegang peran sentral di Jawa Timur tahun 1960-an. Sasaran BTI/PKI yakni petani kecil yang berperan sebagai *klien* atau penggarap sawah para petani Kaya, namun kemudian sebagian para petani kecil tersebut masih setia kepada patronnya dan selanjutnya Pemerintah ikut turun tangan dalam mensejahterakan para petani kecil yakni melalui program penyuluhan massal dan pemberian dana bantuan untuk awal produksi padi.

Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan dana bantuan dari pemerintah di tahun 1965 direalisasikan melalui pelaksanaan program Bimas dan Inmas. Dalam pelaksanaan penyuluhan Bimas dan Inmas ini banyak para petani yang kemudian tidak lagi menaruh minat terhadap proses penyuluhan tersebut. Sebagian petani hanya berminat menerima bantuan logistik dan kredit bantuan saja namun tidak lagi berminat mengikuti penyuluhan Bimas. Karena adanya G30S/PKI membuat suasana di daerah-daerah menjadi berbahaya dan menyulitkan pelaksanaan penyuluhan.⁵⁰

Sikap para petani yang tidak lagi menaruh minat terhadap penyuluhan tersebut menunjukkan tidak mustahil jika aksi-aksi pemogokan para petani yang menempati urutan tertinggi dari pemogokan di berbagai sektor di Jawa Timur khususnya Surabaya di tahun 1965/1966 ada kaitannya dengan sistem pertanian bagi hasil dan aksi sepihak yang dilakukan oleh para petani dari lingkungan PKI/BTI meskipun di tahun tersebut kekacauan sudah semakin menurun dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 1963/1964 dimana kekacauan akibat aksi sepihak PKI/BTI memuncak ketika terdapat persengketaan dalam pelaksanaan UUPBH dan UUPA (*landreform*).⁵¹ Oleh karena itu pelaksanaan Bimas dan Inmas tidak bisa berjalan secara maksimal juga dikarenakan adanya hambatan dari pengaruh kondisi politik yang sedang mengalami konflik.

e) Upaya Walikota Soekotjo dalam Mengatasi Permasalahan Bimas dan Inmas Lama

Adanya berbagai hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Bimas dan Inmas mengakibatkan produksi padi menurun dan tidak bisa memenuhi permintaan konsumen di pasaran. Dengan demikian maka harga beras yang beredar di pasaran menjadi semakin naik karena kelangkaan beras di pasaran. Hal ini membuat masyarakat

kesulitan menjangkau harga beras dan mengakibatkan adanya krisis beras.

Upaya yang ditempuh oleh Walikota Soekotjo dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan Bimas dan Inmas yakni dengan menggunakan dropping beras. Walikota Soekotjo mencari bantuan beras ke Kalimantan tahun 1967, dengan usaha tersebut diperoleh jatah 100 ton beras yang telah habis dibagikan kepada penduduk Surabaya pada bulan Januari 1967, kemudian bulan Oktober 1967 diperoleh jatah 500 ton yang kemudian disalurkan kepada penduduk dengan menggunakan sistem kupon @2 kg dengan harga Rp. 16,50 per kg, pada Bulan November 1967 hanya diperoleh jatah 100 ton beras dibagikan kepada penduduk dengan harga Rp. 17 per kg, kemudian bulan Desember diperoleh 500 ton yang dibagikan kepada penduduk dengan harga Rp. 26,50 per kg.⁵²

Upaya lain yang dilakukan Walikota Soekotjo dan pemerintah Kota Surabaya adalah memperbaiki program yang sedang dijalankan, yakni program Bimas dan Inmas. Dengan demikian maka selanjutnya dilaksanakan program Bimas dan Inmas baru dengan menggunakan bibit unggul baru, teknologi pertanian yang responsif terhadap bibit unggul baru, dan sistem perluasan lahan. Pelaksanaan Bimas dan Inmas baru tersebut diturunkan dari kebijakan pemerintah pusat yang masa itu memasuki masa pemerintahan baru yakni masa Orde Baru.

B. Pelaksanaan Bimas dan Inmas Masa Orde Baru Di Surabaya Masa Pemerintahan Walikota Soekotjo Tahun 1969-1974

a) Pelaksanaan Bimas dan Inmas Masa Orde Baru di Surabaya Masa Walikota Soekotjo Tahun 1969-1974

Pembangunan dalam sektor pertanian diupayakan pada pemerataan jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut, karena jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih banyak daripada lahan pertanian yang ada, dalam pengertian lain jumlah pekerja lebih dari yang dibutuhkan pada sektor pertanian. Selain itu pembangunan sektor pertanian juga difokuskan pada produksi pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar dalam ekonomi Indonesia yakni kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, sedangkan 75% dari penduduk kehidupannya bergantung pada sektor pertanian.⁵³

Selanjutnya pemerintah menfokuskan pembangunan pada Repelita I terhadap kebijakan pangan yang identik dengan beras, oleh karena itu pemerintah kemudian memutuskan untuk meneruskan kebijakan Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 177

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 177

⁴⁹ Walikota Murachman menjabat sebagai Walikota tahun 1964-1965. Walikota Murachman merupakan Walikota Surabaya yang menganut PKI sehingga tidak jarang keputusan Walikota Murachman menguntungkan pihak BTI/PKI di Surabaya.
<https://rajaagam.wordpress.com>

⁵⁰ <http://repository.ipb.ac.id>. *op cit.*

⁵¹ Aminuddin Kasdi. *op cit.*, hlm. 143

⁵² Surabaya post, Kamis 18 Januari 1968 Tahun ke- XIV No. 582. *Walikota Surabaya Bertolak Ke Kalimantan Tjari Beras.*, hlm. 2

⁵³ Buku Repelita I. Buku II A Bab VI Pertanian dan Irigasi. bappenas.go.id. Diakses Pada Senin 06 Maret 2017., hlm. 11

Massal) yang telah dijalankan sejak tahun 1965/1966. Repelita I yang mulai dilaksanakan di tahun 1969 memberikan pengenalan terhadap teknologi baru, benih-benih unggul baru yang responsif terhadap pemakaian pupuk pada benih baru tersebut.⁵⁴

Pengenalan teknologi dan benih baru dalam pelaksanaan Bimas masa Repelita I tersebut termasuk salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada penerapan Bimas dan Inmas tahun 1965/1966. Sebelumnya penerapan program Bimas dan Inmas mengalami kegagalan akibat respon negatif dari para petani pedesaan yang masih *subsisten*, mahalnya harga pupuk dan terlambatnya bantuan alat-alat pertanian. Hambatan yang dialami tersebut mengakibatkan rendahnya produksi padi/beras dan membuat harga beras semakin naik akibatnya sebagian besar masyarakat tidak bisa menjangkau harga beras tersebut.

Karena adanya hambatan yang sempat terjadi dalam proses penerapan program Bimas dan Inmas, maka tahun 1969 atau pada pelaksanaan Repelita I pembaharuan dilakukan dalam penerapan Bimas dan Inmas yakni yang dinamakan dengan Bimas Baru dan Inmas Baru yakni program pertanian dimana penanaman padi menggunakan bibit unggul baru yakni PB-5 dan PB-8.⁵⁵ Pelaksanaan program Bimas dan Inmas baru ini dianggap sebagai suatu program pertanian yang lebih modern dari Bimas dan Inmas sebelumnya.

Kegiatan penyuluhan yang sebelumnya sempat terhenti karena berbagai hambatan kemudian dilaksanakan kembali pada Bimas dan Inmas baru. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan berbeda dengan kegiatan penyuluhan pada Bimas dan Inmas lama, dimana kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan sebagai sosialisasi penanaman bibit unggul baru dan cara penggunaan teknologi yang responsif terhadap bibit unggul baru tersebut.

Dalam program Repelita I, Bimas diartikan sebagai kegiatan penyuluhan massal yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi khusus terhadap padi atau beras dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.⁵⁶ Dengan tujuan awal yakni menyejahterakan masyarakat maka dalam pelaksanaannya Bimas dan Inmas mengupayakan berbagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan produksi para petani Bimas. Selain untuk kesejahteraan masyarakat penerapan Bimas dan Inmas kebudian juga ditujukan untuk pencapaian swasembada beras. Hal ini menunjukkan bahwa selain untuk kepentingan masyarakat Bimas dan Inmas dilaksanakan juga untuk kepentingan pemerintah yakni pencapaian swasembada beras.

Pencapaian tujuan pelaksanaan Bimas dan Inmas dalam Repelita I tersebut dapat dilihat melalui tingginya tingkat produksi dan menurunnya harga-harga makanan

pokok, karena dua hal tersebut bisa mewakili kesejahteraan para petani pedesaan. Selain itu kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari sistem pertanian yang sudah mulai modern, yakni yang ditandai dengan adanya penggunaan teknologi yang lebih maju dari sebelumnya. Dengan demikian maka terlihat perbedaan dari petani pedesaan dalam pelaksanaan Bimas dan sebelum pelaksanaan Bimas. Perubahan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan Bimas yang mampu menyejahterakan para petani Bimas.

Selain tujuan untuk menyejahterakan para petani, tujuan lain yakni untuk mencapai swasembada beras. Dalam hal ini terlihat setelah tercapai kesejahteraan para petani pedesaan dan masyarakat pada umumnya maka tujuan selanjutnya yang akan dicapai yakni untuk kepentingan pemerintah karena masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan dari sandang dan pangan. Diketahui bahwa swasembada beras tersebut mampu dicapai di tahun 1984 yakni pada pelaksanaan Repelita IV.⁵⁷ Pencapaian tersebut berhasil direalisasikan jauh setelah terpenuhinya kebutuhan sandang pangan masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan 1965.

Kemudian pada tahun 1970/1971 dilaksanakan program peningkatan produksi padi musim tanam Oktober 1970 - Maret 1971 dan tahun 1974/1975 dilaksanakan program peningkatan produksi padi dan palawija musim tanam Oktober 1974 - Maret 1975. Untuk perbaikan penerapan program Bimas dan Inmas maka berikutnya tahun 1973 BUUD diikutsertakan dalam menjaga kestabilan harga minimum beras yang sebelumnya merupakan tugas Bulog.⁵⁸ Kemudian BUUD juga digunakan untuk tempat penyetoran sebagian hasil pertanian para petani Bimas untuk pembayaran pengembalian dana bantuan kredit.

Selanjutnya pada penerapan Inmas, sistem penyaluran kredit dana bantuan bagi petani Bimas mengalami peningkatan yakni dalam tahun 1971 telah disalurkan kredit Bimas sebesar Rp. 10,97 milyar kepada 1.684.000 petani, dua tahun kemudian yakni pada tahun 1973 telah meningkat menjadi Rp. 17,71 milyar dengan jumlah penerima yakni 2.263.000 petani, hal ini berarti telah terjadi peningkatan penyaluran kredit dana bantuan Bimas sebesar 160,4 persen dan peningkatan peserta program Bimas sebesar 134 persen.⁵⁹ Dengan adanya peningkatan pada saluran kredit dana bantuan Bimas sekaligus kenaikan pada peserta petani Bimas menunjukkan bahwa penerapan Bimas semakin diminati oleh para petani, dengan demikian maka produksi Bimas yang meningkat juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dana bantuan Bimas dan meningkatnya peserta petani Bimas.

Selain perkembangan sektor luas areal panen melalui Bimas dan Inmas juga terjadi perkembangan dalam

⁵⁴ Li Rubi Kandar. 2014. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunung Kidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974)*. Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta., hlm. 37

⁵⁵ Buku II Repelita I Bab VI Pertanian dan Irigasi. Bappenas.go.id. Diakses Pada Senin 06 Maret 2017., hlm. 24

⁵⁶ *Sejarah Penyuluhan Pertanian dan Hadirnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian- Bagian II*.

bbppketindan.bpsdmp.pertanian.go.id. diakses pada Sabtu 15 April 2017.

⁵⁷ Irwan Syambudi. *Ketahanan Pangan: Swasembada Beras*. <https://www.academia.edu>. Diakses pada Senin 1 Mei 2017.

⁵⁸ R. Z. Leiressa, dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: departemen Pendidikan dan Kebudayaan., hlm. 102

⁵⁹ Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975-1976., hlm. 231

sektor produksi tanaman pangan. Pembangunan yang dilakukan tersebut memberikan sumbangan yang cukup tinggi dalam sektor produksi dimana hasil produksi pertanian yang semakin naik setiap tahunnya yang menjadi bukti keberhasilan dalam pembangunan tersebut. Kenaikan hasil produksi pertanian dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.3: Produksi Tahunan Rata-Rata Tanaman Pangan Utama Jawa Timur Tahun 1952-1998 (dalam ribuan ton)

Tanaman	1952-1962	1970-1979	1984-1988
Padi	3.502	4.155	8.150
Jagung	1.086	1.293	3.033
Ketela pohon	3.188	3.628	4.109
Ubi jalar	511	355	266
Kacang tanah	87	104	128
Kacang kedele	260	281	448

Sumber: Howard Dick, dkk. 1997. *Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 55

Berdasarkan tabel tersebut maka ditunjukkan bahwa produksi bahan pangan dalam sektor pertanian terus meningkat selama pembangunan Repelita I dan setelahnya yaitu pada periode Repelita Pertama yakni produksi padi naik 653 ribu ton selama tahun 1952 sampai 1962 ke tahun 1970 sampai 1979, padi mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian produksi jagung mengalami kenaikan juga yakni 207 ribu ton sampai tahun 1979. Kenaikan produksi padi dan jagung juga diakibatkan karena produksi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan petani sendiri tetapi juga diperjualkan di pasar.⁶⁰ Hal ini berarti pada tahun 1970-an para petani tidak lagi bersifat subsisten karena produksi dari sektor pertanian tidak hanya diperuntukan konsumsi pribadi tetapi juga untuk dijual di pasar oleh karena itu produksi harus terus ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen pasar.

Hal yang sama juga terjadi di produksi ketela pohon, sebelumnya ketela pohon hanya dijadikan makanan pokok di daerah-daerah miskin di Jawa namun pada tahun 1970-an ketela pohon mulai diproduksi untuk diperjualkan di pasaran dan diekspor untuk makanan ternak dan juga dijadikan makanan olahan (gaplek).⁶¹ Produksi ketela pohon sampai tahun 1979 naik hingga 440 ribu ton, hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap produksi ketela pohon baik untuk bahan baku ataupun untuk makanan olahan. Berbeda dengan tanaman yang lain, produksi ubi jalar dan kacang kedele mengalami penurunan sampai tahun 1979 yakni ubi jalar turun hingga 156 ribu ton dan kacang tanah turun hingga 17 ribu ton. Kemudian produksi kacang kedele mengalami kenaikan yakni hingga 21 ribu ton sampai tahun 1979.

b) Dampak Pelaksanaan Program Bimas dan Inmas di Surabaya

Pelaksanaan Bimas dan Inmas di Surabaya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi Surabaya dan masyarakat Surabaya. Dampak positif tersebut yakni:

1. Produksi bahan makanan pokok di Surabaya tahun 1965-1974

Kebijakan Walikota Soekotjo yang telah diterapkan dalam pembangunan di Surabaya sebagian besar mengacu kepada kebijakan pusat yang dilaksanakan di daerah, kebijakan yang diterapkan tersebut yakni kebijakan Repelita I. Diketahui bahwa dalam pelaksanaan Repelita I sasaran pembangunan lebih difokuskan pada peningkatan produksi pangan dengan tujuan untuk mengatasi krisis pangan yang sempat terjadi sebelum penerapan Bimas dan Inmas masa Demokrasi Terpimpin. Ketersediaan beras sebagai bahan makanan pokok bagi masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan program ini sehingga produksi beras ditargetkan meningkat sebesar 47% sampai akhir pelaksanaan Repelita I (tahun 1974).⁶²

Pembangunan di Surabaya dalam sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi produksi beras dan peningkatan tingkat konsumsi beras. Jumlah produksi beras terus meningkat dari tahun 1968 dengan jumlah 11.666 ribu ton menjadi 14.702 ribu ton di tahun 1973, kenaikan jumlah produksi beras tersebut mencapai rata-rata 4,8% dalam setiap tahunnya.⁶³ Kenaikan produksi beras tersebut disebabkan oleh penambahan luas areal pertanian (sawah) sehingga hasil pertanian juga semakin meningkat. Penambahan luas areal pertanian tersebut juga disebabkan karena bertambah baiknya sarana pengairan sehingga luas sawah baku yang sebelumnya dapat dipanen dua kali dalam setahun mulai bertambah, kemudian luas areal tersebut juga dikarenakan adanya jaringan-jaringan irigasi baru, perluasan sawah baku, dan pencetakan sawah baru, faktor selanjutnya yang mendukung adanya kenaikan dalam produksi beras yakni penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang lebih intensif, dan penggunaan pestisida.⁶⁴

2. Harga bahan makanan pokok di Surabaya tahun 1965-1974

Harga makanan pokok tahun 1968 khususnya beras di Surabaya sudah mulai turun meskipun sebagian masyarakat masih menganggap mahal, harga beras jagung turun sampai antara Rp. 23 dan Rp. 25 diketahui bahwa sebelumnya harga beras jagung naik sekitar Rp. 36 per kilo, sedangkan harga jagung biji masih tinggi karena jagung masih banyak dibutuhkan untuk campuran bubuk kopi, kemudian harga beras slip I dan beras tuton putih kini turun masing-masing menjadi Rp. 53 dan Rp. 47 per kilo setelah sebelumnya naik sampai harga Rp. 61 pada bulan Januari sedangkan beras slip II turun menjadi Rp. 49 dan

⁶⁰ Howard Dick, dkk. 1997. *Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 57

⁶¹ *Ibid.*

⁶² R. Z. Leiressa, dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., hlm. 101

⁶³ Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I. *op cit.*, hlm. 25

⁶⁴ *Ibid.*

beras tuton setengah putih menjadi Rp. 43 per kilo.⁶⁵ Penurunan harga makanan pokok ini disebabkan adanya peningkatan dalam produksi pangan, karena semakin tinggi tingkat produksi maka harga yang beredar di pasaran akan semakin menurun hal ini disebabkan distribusi bahan pangan yang sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan penerapan program Bimas dan Inmas serta Repelita I memang sudah cukup berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang cukup baik, namun pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973 terjadi kenaikan harga pangan khususnya beras yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Naiknya harga beras di akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973 ini dikarenakan adanya krisis pangan yang terjadi saat persediaan beras pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 1972 ternyata kurang dibandingkan dengan jumlah permintaan yang ada sehingga ketersediaan beras tersebut tidak mampu mencukupi permintaan atau kebutuhan beras masyarakat.⁶⁶

Adanya hambatan dalam penerapan Bimas dan Inmas membuat pemerintah harus dapat menemukan solusi untuk pemulihan masalah dalam pembangunan di bidang pertanian tersebut. Usaha yang dilakukan pemerintah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan memperbaiki program Bimas dan Inmas yang diberi nama Program Bimas Baru. Pada tahun 1973/74 program Bimas Baru dilaksanakan di areal sawah yang mempunyai pengairan yang sangat baik. Sasaran dari penerapan program Bimas Baru ini disesuaikan dengan rencana perbaikan dan perluasan sistem irigasi dengan tujuan tercapainya usaha intensifikasi areal panen yang semakin bertambah.⁶⁷

Penerapan program Bimas Baru memberikan dampak yang positif bagi produksi padi karena Bimas Baru yang dilaksanakan menggunakan bibit unggul baru yakni bibit unggul PB-5 dan PB-8 sedangkan Bimas Lama menggunakan bibit unggul lain.⁶⁸ Dengan penerapan bibit unggul baru tersebut membuat hasil panen padi semakin tinggi dan mampu mengatasi hambatan yang sempat terjadi pada penerapan Bimas dan Inmas lama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi Kota Surabaya oleh Walikota Soekotjo dimulai setelah kondisi politik yang kacau telah berhasil diredam pada tahun 1965. Selain itu pembangunan juga dilaksanakan karena adanya Inflasi dan krisis pangan di tahun 1965. Tujuan yang hendak dicapai oleh Walikota Soekotjo yaitu menjadikan Surabaya menjadi kota modern yang mampu memenuhi tuntutan abad 20 dan mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan bagi masyarakat Surabaya. Dalam proses pembangunan

ekonomi tersebut Walikota Soekotjo menerapkan kebijakan yang diturunkan dari kebijakan nasional.

Dalam membangun ekonomi Surabaya pada sektor pertanian, Walikota Soekotjo melaksanakan program Bimas dan Inmas dengan lima kegiatan yang disebut Panca Usaha Tani di tahun 1965/1966. Kegiatan panca Usaha Tani tersebut yakni meliputi: (1) penggunaan varietas unggul; (2) pemupukan; (3) pengendalian hama dan penyakit; (4) irigasi; (5) pengolahan tanah yang baik. Pola pelaksanaan Inmas yakni dilaksanakan dengan cara pemberian program kredit usaha tani kepada para petani, sedangkan pola pelaksanaan Bimas awalnya yakni berupa penyuluhan terhadap para petani yang menerima kredit usaha tani.

Namun dalam pelaksanaannya Bimas dan Inmas mengalami banyak hambatan yakni mulai dari hambatan dari naiknya harga pupuk dan kurang baiknya perairan sawah, kurang lancarnya penyaluran logistik pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian, kurang adanya fasilitas pengangkutan, kurang lancarnya kredit untuk petani, kurang intensifnya pelaksanaan Bimas dan Inmas, adanya peristiwa G30S/PKI yang membuat suasana di daerah-daerah menjadi tidak kondusif dan menyulitkan pelaksanaan penyuluhan, perencanaan yang tergesa-gesa dan tidak sempurna bagi daerah-daerah tertentu.

Dengan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan Bimas dan Inmas tahun 1965 maka dilakukan upaya untuk memperbaiki program tersebut. Oleh karena itu Walikota Soekotjo kembali melaksanakan Bimas dan Inmas di tahun 1969, namun perbedaannya Bimas dan Inmas yang dilaksanakan merupakan Bimas dan Inmas baru. Program tersebut merupakan turunan dari Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam sektor pertanian. Dengan demikian maka tahun 1969 mulai dilaksanakan program Bimas dan Inmas baru dengan menggunakan bibit unggul baru yakni PB-5 dan PB-8.

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian yang dilakukan di Surabaya masa Walikota Soekotjo memberikan kontribusi bagi masyarakat Surabaya. Kontribusi yang pertama dapat dilihat dari hasil laporan Departemen Pertanian yang menyatakan bahwa produksi beras tahun 1967 mengalami peningkatan yakni 2,2% dari jumlah produksi di tahun 1966, dimana tahun 1967 jumlah produksi beras mencapai 80,7% yakni sekitar 17.930.000 ton, tetapi peningkatan tersebut masih dibawah target.

Selanjutnya Harga makanan pokok tahun 1968 khususnya beras di Surabaya sudah mulai turun meskipun sebagian masyarakat masih menganggap mahal, harga beras jagung turun sampai antara Rp. 23 dan Rp. 25 diketahui bahwa sebelumnya harga beras jagung naik sekitar Rp. 36 per kilo, sedangkan harga jagung biji masih tinggi karena jagung masih banyak dibutuhkan untuk campuran bubuk kopi, kemudian harga beras slip I dan beras tuton putih kini turun masing-masing menjadi Rp. 53 dan Rp. 47 per kilo setelah sebelumnya naik sampai harga Rp. 61 pada bulan Januari sedangkan beras slip II turun

⁶⁵ Surabaya Post, Sabtu 10 Februari 1968 Tahun Ke- XIV No. 601. *Beras Turun Tetapi Masih Mahal.*, hlm. 2

⁶⁶ Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I. *op cit.*, hlm. 23

⁶⁷ Buku II Repelita I Bab VI Pertanian dan Irigasi. Bappenas.go.id. Diakses Pada Senin 06 Maret 2017., hlm. 24

⁶⁸ *Ibid.*

menjadi Rp. 49 dan beras tuton setengah putih menjadi Rp. 43 per kilo.

Selain itu, kontribusi pembangunan ekonomi Surabaya juga dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja. Masyarakat Pedesaan Surabaya mayoritas bekerja di sektor pertanian/ perkebunan yakni dengan jumlah 155661 orang, hal ini cukup wajar karena lokasi tempat tinggal masyarakat pedesaan yang cukup strategis dan dekat dengan lahan-lahan pertanian dan perkebunan, daerah sekitar pedesaan biasanya masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, selain itu masyarakat pedesaan juga merupakan pemasok bahan baku atau bahan mentah untuk bahan dasar makanan pokok maupun makanan tambahan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait. Saran yang penulis ajukan yakni:

Saran bagi penelitian selanjutnya tentang Ekonomi Surabaya, Pertanian Surabaya dan tentang Walikota Soekotjo, seharusnya mampu memperkuat sumber-sumber sekunder berupa buku dan bacaan yang lain karena karena dokumen dan arsip yang tersedia hanya terbatas. Penelitian selanjutnya juga seharusnya mampu bekerjasama dengan Lembaga Pemerintahan yang ada di Kota Surabaya agar mampu memperoleh sumber yang lebih spesifik tentang Kota Surabaya.

Saran bagi Lembaga Pemerintahan di Surabaya dan instansi lain di Surabaya yang menyimpan arsip dan dokumen sejarah, hendaknya perawatan terhadap sarsip dan dokumen tersebut lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Dinas Pertanian Rakyat Kotamadya Surabaya. 24 Maret 1973. Laporan Mingguan Harga Bahan Makanan Pokok dan Situasi Pupuk Untuk Bimas/Inmas. Badan Arsip Kota Surabaya.
- Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. 26 Maret 1973. Penyetoran Padi/gabah Peserta Bimas. Badan Arsip Kota Surabaya.
- Lampiran Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 1 April 1969-31 Desember 1975 pada Buku II Bab Pembantu Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Jawa Timur.

Dokumen

- Buku II Repelita I Bab VI Pertanian dan Irigasi. Bappenas.go.id.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975-1976. *Pertanian, Pengairan, dan Kehutanan*. Bappenas.go.id.

Surat Kabar

- Surabaya Post, Selasa 3 Mei 1966 Tahun Ke- XIV No. 93. *Bimas Hasilkan Baik Sekali Tapi Penguasaan*

Produksi Beras Oleh Pemerintah Hanya Sukses 10 Persen.

- Surabaya Post, Senin 2 Oktober 1967 Tahun Ke- XIV No. 502. *Pengertian Masyarakat Tertumpah Kepada Walikota Kol. R. Soekotjo.*
- Surabaya Post, Sabtu 7 Oktober 1967 Tahun Ke- XIV No. 507. *Kolonel R. Soekotjo Dilantik Sebagai Walikota Surabaya.*
- Surabaya Post, Jum'at 12 Januari 1968 Tahun ke- XIV No. 574. *Walikota Kolonel Soekotjo : Semua Fihak Agar Mawas Diri Apakah Tidak Korupsi & Tjuman Ngompol.*
- Surabaya post, Kamis 18 Januari 1968 Tahun ke- XIV No. 582. *Walikota Surabaya Bertolak Ke Kalimantan Tjari Beras.*
- Surabaya Post, Djum'at 19 Djanuari 1968 Tahun Ke- XIV No. 583. *Laporan Tahunan Dep. Pertanian: Produksi Beras 1967 Meningkatkan 2,2% Tetapi Dibawah Target.*
- Surabaya Post, Rabu 6 Maret 1968 Tahun Ke- XIV No. 622. *Bimas Terhambat Oleh Ketidaksamannya Harga Pupuk Pasar Dan Pertani.*
- Surabaya Post, Sabtu 10 Pebruari 1968 Tahun Ke- XIV No. 601. *Beras Turun Tetapi Masih Mahal.*

Majalah

- Sjofjan Asnawi. *Irigasi*. Prisma II, 1998.,

Buku

- Agam, Yousri Nur Raja. 2013. *Riwayat Surabaya Rek*. Surabaya: Cahaya Aura Kasih.
- Anggraini, Devi Kristina. 2013. *Industri Surabaya Pada Masa Pemerintahan Walikota Soekotjo Tahun 1965-1974*. Jurnal (online). Vol. 3 No. 1. Universitas Airlangga Surabaya.
- Dick, Howard, dkk. 1997. *Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kandar, Li Rubi. 2014. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Gunung Kidul Masa Revolusi Hijau (1970-1974)*. Yogyakarta: Universitas negeri Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T. 1970. *Inti Pengetahuan REPELITA*. Jakarta: Erlangga.
- Kasdi, Aminuddin. 2016. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Surabaya: Unesa University Press.,
- Leiressa, R. Z., dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Krisnawati, Rina. 2010. *Lotere Totalisator di Surabaya Tahun 1968-1969*. Skripsi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Mufti, Hikmah Rafika. 2009. *Kebijakan Pangan Pemerintah Orde baru dan Nasib kaum Petani Produsen Beras 1969-1988*. Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta.
- Poesponegoro, Marwati Djoed dan Nugroho Notosusanto. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Siahaan, N. H. T. 2004. *Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyudi, Agus. 2006. *Sketsa Tokoh Surabaya*. Surabaya: Selasar.

Jurnal

- Denik Nur Cahyanti. 2014. *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 1950-1966*. Jurnal (online). Vol. 2 No. 3, Oktober 2014. Universitas Negeri Surabaya.
- Putri, Alfin Syah K. 2003. Tradisi Sedekah Bumi (Kajian Tentang Keberadaan Tradisi Sedekah Bumi di Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya). Abstrak Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Handinoto dan Samuel Hartono. 2007. *Surabaya Kota Pelabuhan (Surabaya Port City)*. Jurnal (online). Dimensi Teknit Arsitektur Vol. 35 No. 1. Surabaya: Universitas kristen Petra Surabaya.

Artikel

- City Story: Surabaya*. 20 November 2014. www.propertyandthecity.com.
- Sejarah Penyuluhan Pertanian dan Hadirnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian-Bagian II*. bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id.
- Rifqi. 2015. *Menegenal Lebih Dekat Saksi Sejarah Kota Surabaya*. rifqimediaagency.blogspot.co.id
- Syambudi, Irwan. *Ketahanna Pangan: Swasembada Beras*. <https://www.academia.edu>.
- Wali Aya Rumbia. 2009. *Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Tingkat Pertumbuhan Ekonomi*. <http://118.97.35.230/pustaka/download/wali-ayarumbia/perekonomian%20nasional%20ditinjau%20dari%20tingkat%20pertumbuhan%20ekonomi.pdf>.

